BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sikap dan Perilaku

Teori sikap dan perilaku yang dikembangkan oleh Triandis (1971) dipandang sebagai teori yang dapat mendasari untuk menjelaskan keahlian, pengalaman, kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor. Teori tersebut menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh sikap, aturan-aturan sosial dan kebiasaan. Sikap terdiri dari komponen kognitif yaitu keyakinan, komponen afektif yaitu suka atau tidak suka, berkaitan dengan apa yang dirasakan dan komponen perilaku yaitu bagaimana seorang ingin berprilaku terhadap sikap.

Menurut Robbins (2003) sikap adalah pernyataan evaluatif, baik yang menguntungkan atau ridak menguntungkan tentang objek, orang, atau pristiwa. Sedangkan menurut Khikmah (2005) sikap adalah memberikan pemahaman tentang tendisi atau kecenderungan untuk bereaksi. Pembentukan atau perubahan sikap ditentukan oleh dua faktor pokok yaitu faktor individu (faktor dalam) dan faktor luar. Faktor individu adalah faktor yang berhubungan dengan respon individu menanggapi dunia luar secara selektif. Sedangkan faktor luar adalah faktor yang berhubungan dengan hal-hal atau keadaan dari luar yang merupakan rangsangan atau stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap (Maryani dan Ludigdo, 2001).

Sikap memiliki fungsi: pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, defensi ego dan ungkapan nilai. Pemahaman berfungsi membantu seseorang dalam memberikan maksud atau memahami situasi atau peristiwa baru. Sikap juga melayani suatu hal yang bermanfaat atau sebagai fungsi kebutuhan yang memuaskan. Sikap juga melayani fungsi defensif ego dengan melakukan pengembangan guna melindungi manusia dari pengetahuan yang melandaskan kebenaran mengenai dasar manusia itu sendiri atau dunianya, dan akhirnya sikap juga melayani fungsi nilai ekpresi untuk mencapai kepuasan. Jika dapat disimpulkan bahwa sikap adalah

pengetahuan, perasaan-perasaan, dan kecenderungan untuk bertindak sehingga berfungsi mengarahkan dan memberikan pedoman bagi perilaku seseorang terhadap masalah atau keadaan yang akan dihadapi.

Menurut Notoatmojo (2007) Perilaku merupakan totalitas penghayatan dan aktivitas, yang merupakan hasil akhir jalinan yang saling mempengaruhi antara berbagai macam gejala seperti perhatian, pengalaman, pikiran, ingatan, dan fantasi gejala itu muncul bersama-sama dan mempengaruhi faktor. Menurut Notoatmodjo (2005) menyatakan bahwa perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena itu perilaku terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner disebut teori ”S-O-R” atau Stimulus-Organism-Response. Berdasarkan teori S-O- R ini perilaku manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Perilaku tertutup (covert behaviour): Perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulus masih belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respon seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk covert behaviour yang diukur adalah pengetahuan dan sikap.
2. Perilaku terbuka (overt behaviour): Perilaku terbuka ini terjadi bila respon terhadap stimulus sudah berupa tindakan atau praktek yang dapat diamati orang dari luar. Perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perilaku seseorang ditentukan oleh banyak faktor. Adakalanya perilaku seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya, adapula karena kebutuhannya dan ada juga yang dipengaruhi oleh pengharapan dan lingkungannya (Thoha, 2005). Perilaku merupakan respon seseorang terhadap stimulus yang berasal dari dalam maupun luar dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif atau tanpa tindakan seperti berpikir, berpendapat, bersikap maupun aktif atau melakukan tindakan (Sarwono, 2004).

Teori sikap dan perilaku dapat mempengaruhi auditor untuk bertindak, jujur, adil, tegas tanpa dipengaruhi tekanan maupun permintaan dari pihak tertentu atau kepentingan pribadi yang nantinya akan mempengaruhi auditor dalam pengambilan keputusan. Keahlian auditor yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kompetensi, profesional dan lainnya diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai auditor yang independen dan berkualitas.

2.2 Kecurangan

Kecurangan adalah suatu hal yang paling kita benci karena terjadi sesuatu yang tidak sportif maupun tidak jujur. Kecurangan sebagian besar dapat merugikan orang lain, perusahaan, negara, maupun dirinya sendiri. Maka hindarilah *Fraud* (Kecurangan) dalam diri Anda.

Definisi Fraud (Ing) menurut Black Law Dictionary adalah :

"1. *A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment is usual a tort, but in some cases (esp. When the conduct is willful) it may be a crime, 2. A misrepresentation made recklessly without belief in its truth to induce another person to act, 3. A tort arising from knowing misrepresentation, concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to induce another to act to his or her detriment*." Yang diterjemahkan (tidak resmi), kecurangan adalah :

1. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus yang terjadi (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan.
2. Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat.
3. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian

yang salah (salah pernyataan), menyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya.

Menurut Kamus Hukum, mengartikan *Fraud* (Ing) = *Fraude* (Bld) sebagai kecurangan = *Frauderen/verduisteren* (Bld) : menggelapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 KUHP, Pasal 268 KUHPer.

Menurut Alison (2006) dalam artikel yang berjudul Fraud Auditing mendefinisikan:
"Kecurangan (*Fraud*) sebagai bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut."

2.2.1 Jenis- jenis Kecurangan

Dalam konteks audit laporan keuangan, fraud merupakan suatu penyajian laporan keuangan yang dengan sengaja dibuat keliru (mengandung salah saji). Ada dua jenis *fraud* yang utama (Sunyoto, 2016) yaitu :

1. Pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan biasanya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Manipulasi, pemalsuan atau mengubah catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan.
2. Kesalahan pengungkapan, atau penghilangan secara sengaja peristiwa, transaksi atau informasi signifikan lain dalam laporan keuangan.
3. Kesalahan yang disengaja atas penerapan prinsip akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi,penyajian, atau pengungkapan.
4. Mencatat jurnal fiktif, terutama menjelang akhir periode akuntansi, untuk manipulasi hasil operasi atau mencapai tujuan lainnya.

5. Menyesuaikan asumsi secara tidak tepat, dan mengubah pertimbangan yang telah digunakan dalam mengestimasi saldo akun.
6. Menghilangkan, mengakui lebih dahulu, atau menunda pengakuan di dalam laporan keuangan atas peristiwa dan transaksi yang telah terjadi sepanjang periode berjalan.
7. Menyembunyikan atau tidak mengungkapkan fakta ataupun kebenaran yang dapat mempengaruhi suatu jumlah yag tercatat dalam laporan keuangan.
8. Menggunakan transaksi yang kompleks untuk menyajikan posisi atau kinerja keuangan entitas yang tidak semestinya.
9. Mengubah catatan dan ketentuan yang terkait dengan transaksi signifikan dan tidak biasa.

2. Penyalahgunaan terhadap aset biasa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menyelewengkan hasil penerimaan kas perusahaan, dengan menyalahgunakan hasil penagihan piutang usaha dari pelanggan, atau mengalihkan penerimaan kas entitas ke rekening bank pribadi.
2. Mencuri aset entitas untuk kepentingan pribadi atau dijual, seperti misalnya mengambil persediaan barang dagang, atau mencuri aset tetap perusahaan.
3. Mengambil uang kas perusahaan melalui pembayaran kepada pemasok fiktif atau karyawan fiktif.
4. Menerima uang suap dari pemasok, sebagai tanda balas jasa karena telah meniggikan harga beli.
5. Menggunakan aset entitas untuk kepentingan pribadi, dengan dijadikan sebagai jaminan ke kreditor dalam rangka mendapatkan pinjaman pribadi.
6. Mengambil uang kas perusahaan berupa potongan pembelian yang diperoleh dari pemasok.

2.2.2 Penyebab Kecurangan

Menurut standar audit, ada tiga kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan yaitu:

1. Manajemen maupun karyawan memiliki insentif, dorongan atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
2. Keadaan yang memberi peluang atau kesempatan bagi manajemen maupun karyawan untuk melakukan kecurangan.
3. Suatu perilaku atau karakter yang membuat manajemen maupun karyawan melakukan yang tidak jujur, atau lingkungan yang membuat mereka menjadi bertindak tidak jujur dan membenarkan tindakan tidak jujur tersebut.

2.2.3 Unsur-unsur *Fraud* (Kecurangan)

Dari beberapa definisi atau pengertian *Fraud* (Kecurangan) di atas, maka tergambarkan bahwa yang dimaksud dengan kecurangan (*fraud*) adalah sangat luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Namun secara umum, unsur-unsur dari kecurangan (keseluruhan unsur harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap kecurangan tidak terjadi) adalah harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*), dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*), fakta bersifat material (*material fact*), dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*), dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi, Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*), yang merugikannya (*detriment*). Kecurangan disini juga termasuk (namun tidak terbatas pada) manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aktiva, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi/perusahaan (*Black Law Dictionary*).

2.2.4 Mendeteksi Kecurangan

Seiring dengan perkembangan ekonomi saat ini yang merupakan hasil dari proses pembangunan, teah membuat dunia usaha semakin semarak, kompleks, variatif dan dinamis. Masing-masing perusahaan berusaha untuk menggali segala potensi yang ada agar tetap bertahan dan memenuhi kebutuhan pelanggannya. Namun, seperti juga yang dialami oleh negara-negara maju maupun Negara berkembang, setiap pencapaian kemampuan di bidang ekonomi, cenderung diiringi pula dengan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru, baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Para pelaku kejahatan tersebut cenderung untuk mencari dan memanfaatkan berbagai kelemahan yang ada dalam prosedur, tata kerja, perangkat hukum, kelemahan para pegawai maupun pengawasan yang belum sempat dibenahi. Berbagai cara dan usaha telah dilakukan oleh hampir seluruh perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan baik dengan cara mempromsikan integritas, maupun pengenaan sanksi yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya. Namun, risiko kecurangan tetap mungkin saja terjadi dalam suatu perusahaan. Hal yang menjadi prtanyaan selanjutnya adalah bagaimana menilai kemungkinan masalah demikian muncul (Widjaja, 2016).

Terjadinya kecurangan sebagai berikut:

1. Situasi pribadi yang mengakibatkan timbulnya tekanan yang tidak diharapkan, seperti dililit hutang , dan menderita sakit berat.
2. Keadaan perusahaan yang mengakibatkan timbulnya tekanan yang tidak semestinya, seperi kesulitan ekonomi, banyaknya hutang, meningkatnya persaingan dan kredit pinjaman yang terbatas.
3. Risiko pengendalian yang spesifik, seperti satu orang menangani semua bagian dari suatu transaksi yang penting,supervise yang buruk, penugasan dan tanggung jawab yang tidak jelas.

Dalam pembahasan selanjutnya, faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam faktor generik dan faktor individu.

1. Faktor Generik

Factor ini berada dalam pengendalian organisasi (perusahaan) yang mencakup :

a. Kesempatan atau adanya peluang bagi pelaku kecurangan (*opportunity*) : Kesempatan melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap obyek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan tidak dapat dihilangkan secara keseluruhan atau seratus persen. Usaha untuk menghilangkan kesempatan terjadinya kecurangan secara keseluruhan menjadi tidak ekonomis dan tidak produktif selama perusahaan tersebut masih memiliki asset, dimana asset tersebut diperdagangkan, mengalir, dan ada dalam pengendalian pihak lain seperti karyawan, pembeli, dan penjual.
b. Kemungkinan bahwa kecurangan akan dapat diketahui dan diungkapkan (*exposure*):

   Kondisi saat ini ada kecenderungan makin tipisnya kepekaan seseorang/sekelompok orang terhadap kecurangan yang terjadi di sekelilingnya. Hal ini mungkin saja dipicu oleh kekhawatiran mereka khususnya berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak-pihak yang mengungkapkan terjadinya kecurangan tersebut. Apabila kondisi ini terus terjadi, maka secara logika kecurangan makin merajalela, karena para pelaku kecurangan tersebut merasa bahwa kecurangan apapun yang mereka lakukan tidak ada pihak lain yang berani mengungkapkannya.
c. Sanksi yang dikenakan kepada pelaku jika tertangkap dan perbuatannya terungkap(*exposure*):

   Terungkapnya kecurangan belum cukup untuk mencegah terulang kembalinya kejadian tersebut dimasa yang akan datang. Oleh karena itu harus ada saksi atas perbuatan tersebut yang jelas, tegas, dan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Suatu perusahaan yang ingin melindungi assetnya harus memiliki kebijakan (*policy*) yang jelas mengenai sifat dan besarnya sanksi terhadap pelaku kecurangan, siapapun

yang terlibat kecurangan akan dipecat, semua kecurangan akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

2. Factor Individu

Factor ini melekat pada diri seseorang yang melakukan kecurangan. Secara umum factor ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

a) Moral yang berhubungan dengan keserakahan (*greed*). Keserakahan berhubungan dengan atribut seseorang. Bagaimana dengan atribut lainnya yang ada dalam diri manusia seperti kejujuran, integritas, loyalitas dan sebagainya, adalah sulit untuk mengetahui apakah seseorang memiliki atribut serakah ini atau tidak.
b) Motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan (*need*). Salah satu yang menjadi penyebab seseorang atau sekelompok orang melakukan kecurangan adalah berhubungan dengan kebutuhan ekonomi. Disamping itu juga dapat disebabkan oleh adanya perasaan ketidakpuasan atas kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen, balas dendam, dan tantangan.

Tujuan utama dari pendeteksian kecurangan adalah dalam rangka membantu perusahaan menciptakan suasana sehat dan menguntungkan di dalam lingkungan perusahaan dengan mencegah terjadinya kerugian akibat kecurangan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendeteksi kecurangan adalah :

1. Jangan mengabaikan hal-hal yang jelas. Hal ini untuk menghilangkan kesan bahwa penyelidikan terhadap kecurangan selalu merupakan aktivitas kompleks, padahal dalam prakteknya tidak selalu seperti kesan tersebut di atas. Disamping itu, dalam prekteknya kebanyakan perbuatan kecurangan meninggalkan jejak yang jelas.
2. Berikan perhatian pada penyimpangan yang terjadi, jangan selalu mencari penyelesaian yang kompleks, dan mulailah dengan mencari penyelesaian yang paling sederhana.
3. Lakukan konsentrasi ada titik yang paling lemah dan sederhana di dalam kecurangan.

4. Pendeeksian dan pencegahan kecurangan merupakan aspek rutin, bukan suatu hal yang hanya dilakukan sekali.
5. Tujuan utama mendeteksi kecurangan adalah mencegah terjadinya, bukan mendeteksi seluruh kecurangan.
6. Sumber daya dan kemampuan harus dialokasikan secara khusus untuk melakukan tugas tersebut.
7. Mendeteksi kecurangan berarti kerja keras.
8. Kecurangan dapat lolos dari deteksi disebabkan tidak seorangpun ditugaskan untuk itu.

2.3 Pengertian Auditing

(Agoes , 2011), auditing adalah :

"Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut."

(Arens, alvin, Randal, Elder dan Beasley, 2011) auditing adalah :

" Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person".

Translate : " Auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten, independen orang ".

Pengertian Auditing menurut (Whittington, 2012)

“Auditing is an examination of a company’s financial statements by a firm of independent public accountants. The audit consists of a searching investigation of the accounting records and other evidence supporting those financial statements. By obtaining an understanding of the company’s internal control, and by inspecting documents, observing of assets, making enquires within and outside the company, and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to determine whether the financial statements provide a fair and reasonably complete picture of the company’s financial position and its activities during the period being audited”.

Translate: "Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan publik yang independen. Audit terdiri dari penyelidikan mencari catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan tersebut. Dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati aset, membuat bertanya dalam dan di luar perusahaan, dan melakukan prosedur audit lain, auditor akan mengumpulkanbukti yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan menyediakan adil dan cukup melengkapi gambaran posisi keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit”.

2.3.1 Tujuan Audit

Tujuan audit adalah hasil yang hendak dicapai dari suatu audit. Tujuan audit memengaruhi jenis audit yang dilakukan. Secara umum audit dilakukan untuk menentukan apakah:

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan serta telah disusun sesuai dengan standar yang mengaturnya.
2. Risiko yang dihadapi organisasi telah diidentifikasi dan diminimalisasi.
3. Peraturan ekstern serta kebijakan dan prosedur intern telah dipenuhi.
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi.

5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan diperoleh secara ekonomis.
6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif.

2.3.2 Tanggung Jawab Auditor

Auditor mempunyai tanggungjawab utuk merencanakan dan melaksanakan audit. Pekerjaan auditor ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan klien yang diaudit bebas dari salah saji material. Penyebab salah saji material itu dapat berupa kekeliruan, kecurangan ataupun pelanggaran hukum. Auditor bertanggung jawab untuk mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan sebagai akibat unsur tindakan pelanggaran hukum, seperti tanggung jawab auditor atas kekeliruan dan kecurangan dalam laporan keuangan. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yaang tidak material terhadap laporan keuangan (Hery, 2016). Audit atas laporan keuangan harus dapat memberikan keyakinan bagi para pemakai laporan keuangan tersebut, bahwa auditor telah:

1. Melakukan audit dengan kompetensi teknis, integritas, independensi, dan objektif.
2. Meneliti dan mendeteksi salah saji material, yang disengaja dan tidak disengaja.
3. Mencegah diterbitkannya laporan keuangan yang menyesatkan.

Materi pokok yang merupakan tanggung jawab Auditor adalah sebagai berikut :

1. Independensi Auditor.
2. Keyakinan yang memadai (*Reasonable Assurance*).
3. Tanggung jawab terhadap *Fraud* dan *Illegal Acts.*
4. Tanggung jawab terhadap masalah *Going Concern.*
5. Membuat laporan auditor independen.

2.3.3 Jenis Audit

Sama halnya dengan pengertian auditing, terdapat banyak pendapat mengenai jenis audit. Untuk kepentingan pembahasaan, melalui modul ini mengelompokkan jenis audit ke dalam dua kelompok, yaitu menurut pihak yang melakukan audit dan menurut tujuan pelaksanaan audit (Hery, 2016). Menurut pihak yang melakukan audit, audit dikelompokkan menjadi audit interndan ekstern. Sedangkan menurut tujuannya, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU 15 tahun 2004), audit (pemeriksaan) dibedakan menjadi audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Jenis audit menurut pihak yang melakukan auditan:

1. Audit *Intern*

Audit intern adalah audit yang dilakukan oleh pihak dari dalam organisasi audit. Pengertian organisasi auditi dalam hal ini harus dilihat dengan sudut pandang yang tepat. Organisasi auditi misalnya adalah pemerintah daerah, kementerian negara, lembaga negara, perusahaan, atau bahkan pemerintah pusat. Sebagai contoh, untuk pemerintah daerah, maka audit intern adalahaudit yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern daerah yang bersangkutan (Bawasda). Sedangkan pada organisasi kementerian negara audit intern, dilakukan oleh inspektorat jenderal departemen dan dalam organisasi pemerintah pusat audit intern dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Audit intern dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dalam manajemen. Jadi pelaksanaan audit intern lebih diarahkan pada upaya membantu bupati, walikota, gubernur, menteri ataupun presiden meyakinkan pencapaian tujuan organisasi.

2. Audit *Ekstern*

Audit ekstern adalah audit yang dilakukan oleh pihak di luar organisasiauditi. Dalam pemerintahan Republik Indonesia, peran audit ekstern dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menjalankan auditatas pengelolaan

keuangan negara (termasuk keuangan daerah) oleh seluruh organ pemerintahan, untuk dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Namun demikian, dengan merujuk pembahasan di atas, maka untuk menentukan apakah suatu audit merupakan audit ekstern atau intern harus merujuk pada lingkup organisasinya. Sebagai contoh, audit yang dilakukan oleh BPKP terhadap departemen/ lembaga merupakan audit ekstern bagi departemen/lembaga yang bersangkutan, namun merupakan audit intern dilihat dari sisi pemerintah RI.

Jenis audit menurut tujuan pelaksanaan audit:

1. Audit Keuangan

Audit Keuangan adalah opini (pendapat) audit mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan SAP. Sesuai dengan Undang-Undang 15 Tahun 2004, kewenangan melakukan audit keuangan berada di tangan BPK. APIP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan instansi pemerintah. Namun demikian, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, APIP berkewajiban melakukan *review* (*intern*) atas laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga/ pemerintah daerah. Tujuan pelaksanaan *review intern* tersebut adalah, untuk meyakinkan bahwa penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah telah sesuai dengan SAP. Dengan demikian pada waktu diaudit oleh BPK tidak terdapat lagi permasalahan yang menyebabkan BPK memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah selain Wajar Tanpa Pengecualian atau setidaknya Wajar Dengan Pengecualian.

2. Audit Kinerja /Audit Operasional

Audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan audit kinerja, auditor juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengendalian intern. Audit kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Dalam audit kinerja, langkah yang ditempuh mencakup identifikasi sebab dan akibat mengapa kegiatan tidak

dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif, dalam rangka memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak yang berkepentingan. Kriteria yang digunakan dalam audit kinerja adalah ekonomis, efisien, dan efektif, karena itu, audit kinerja/operasional lazim dikenal dengan sebutan audit 3E.

3. Audit dengan Tujuan Tertentu

Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja/audit operasional. Sesuai dengan definisinya, jenis audit ini dapat berupa semua jenis audit, selain audit keuangan dan audit operasional. Dengan demikian dalam jenis audit tersebut termasuk diantaranya audit ketaatan dan audit *investigatif*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka risiko deteksi berhubungan dengan luasnya pengumpulan dan pengujian bukti yang harus dilakukan auditor. Risiko deteksi yang rendah hanya dapat dicapai jika auditor melakukan pengujian yang luas. Hal ini berarti bahwa risiko deteksi berbanding terbalik dengan luasnya pengujian. Pemahaman mengenai model risiko audit tersebut akan dapat membantu auditor dalam merancang luasnya pengujian agar auditor tidak mengalami risiko audit (dalam arti audit menjadi tidak efektif), serta agar audit dapat dilaksanakan secara efisien (dalam arti audit dapat menghindarkan diri, melakukan perluasan pengujian yang tidak perlu). Guna melakukan rancangan luasnya pengumpulan dan pengujian bukti, model risiko audit diatas perlu dimodifikasi sebagai berikut:

$$\text{RD direncanakan} = \frac{\text{RA yang dapat diterima}}{\text{RI x RP}}$$

2.3.4 Standar Audit

Standar auditing merupakan pedoman untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesinya untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Standar audit mencerminkan ukuran mutu pekerjaan audit laporan keuangan.

Menurut standar audit refrensi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dalam enam kelompok yaitu (IAPI: 2016) :

1. Prinsip Umum Dan Tanggung Jawab

- SA 200: Tujuan Keseluruhan Auditor Independen Dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit
- SA 210: Persetujuan Atas Ketentuan Perikatan Audit
- SA 220: Pengendalian Mutu Untuk Audit Atas Laporan Keuangan
- SA 230: Dokumentasi Audit
- SA 240: Tanggung Jawab Auditor Terkait Dengan Kecurangan Dalam Suatu Audit Atas Laporan Keuangan
- SA 250: Pertimbangan Atas Peraturan Perundang-Undangan Dalam Audit Atas Laporan Keuangan
- SA 260: Komunikasi Dengan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola
- SA 265: Pengomunikasian Defisiensi Dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola Dan Manajemen

2. Penilaian Risiko Dan Respons Terhadap Risiko Yang Menilai

- SA 300: Perencanaan Suatu Audit
- SA 315: Pengidentifikasian Dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman Atas Entitas Dan Lingkungannya
- SA 320: Materialitas Dalam Tahap Perencanaan Dan Pelaksanaan Audit
- SA 330: Respons Auditor Terhadap Risiko Yang Telah Dinilai
- SA 402: Pertimbangan Terkait Dengan Entitas Yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa
- SA 450: Pengevaluasian Atas Kesalahan Penyajian Yang Diidentifikasi Selama Audit

3. Bukti Audit

- SA 500: Bukti Audit
- SA 501: Bukti Audit: Pertimbangan Spesifik Atas Unsur Pilihan
- SA 505: Konfirmasi Eksternal
- SA 510: Perikatan Audit Tahun Pertama
- SA 520: Prosedur Analitis
- SA 530: Sampling Audit
- SA 540: Audit Atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, Dan Pengungkapan Yang Bersangkutan
- SA 550: Pihak Berelasi
- SA 560: Peristiwa Kemudian
- SA 570: Kelangsungan Usaha
- SA 580: Representasi Tertulis

4. Penggunaan Hasil Pekerjaan Pihak Lain

- SA 600: Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Grup
- SA 610: Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
- SA 620: Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor

5. Kesimpulan Audit Dan Pelaporan

- SA 700: Perumusan Suatu Opini Dan Pelaporan Atas Laporan Keuangan
- SA 705: Modifikasi Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor Independen
- SA 706: Paragraf Penekanan Suatu Hal Dan Paragraf Hal Lain Dalam Laporan Auditor Independen

6. Area Khusus

- SA 800: Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Kerangka Bertujuan Khusus
- SA 805: Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Tunggal Dan Suatu Unsur, Akun, Atau Pos Tertentu Dalam Laporan Keuangan

- SA 810: Perikatan Untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan

2.3.5 Prosedur Audit

Menurut Arens (2010)

"Prosedur audit (*audit procedure*) adalah rincian untuk mengumpulkan jenis bukti audit yang diperoleh pada suatu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit."

Sedangkan Bastian (2013) prosedur audit :

1. Perekaman atau pencatatan sistem akuntansi. Langkah pertama dalam prosedur audit adalah menetapkan dan membuktikan sistem yang digunakan untuk merekam atau mencatat transaksi.
2. Review dan evaluasi pendahuluan.
3. Pengujian kepatuhan (*compliance tests*). Pengujian kepatuhan, seperti penamaannya, didesain untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang digunakan atau diandalkan oleh auditor dalam praktiknya dapat berjalan dengan baik. Sifat dari pengujian ini sangat tergantung pada sifat pengendalian, akan tetapi secara esensial pengujian ini meliputi pengecekan transaksi sebagai bukti kepatuhan.
4. Mencocokkan laporan keuangan sebagai dasar pokok perekaman transaksi. Pada akhir tahun atau periode, sangatlah penting untuk melakukan pengecekan bahwa rekening-rekening yang ada dalam laporan keuangan sesuai dengan dasar perekaman transaksi yang ada.
5. Pengujian substantif. Pengujian substantif didesain untuk memperkuat atau membenarkan transaksi dan saldo yang mendasari laporan keuangan.
6. Analisis menyeluruh.
7. Pengujian terperinci.
8. Memastikan kesesuaian kode rekening organisasi.
9. Memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi.
10. Pengujian kebenaran dan kejujuran.
11. Pengujian analitis.

12. Audit peristiwa setelah tanggal neraca.
13. Pengujian laporan manajemen.
14. Surat representasi.
15. Review partner atau auditor atas kerja audit yang telah dilakukan.

Auditor dalam melaksanakan tugasnya harus mendapatkan bukti audit kompeten yang cukup melalui inspeksi, pegamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Dalam usaha memperoleh bukti audit kompeten yang cukup, maka auditor sebelum melaksanakan penugasan audit harus menyusun program audit yang merupakan jumpulan dari prosedur aaudit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Kualitas kerja auditor dapat diketahui dari seberapa jauh auditor melaksanakan prosedur-prosedur audit yang tercantum dalam program audit.

Disamping auditor memakai prosedur audit standar, auditor melaksanakan berbagai prosedur audit lainnya untuk mengumpulkan bukti audit yang akan dipakai sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Adapun prosedur audit yang lain itu sebagai berikut (Kanaka, 2002):

1. Inspeksi

   Inspeksi merupakan pemerikasaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Prosedur audit ini banyak dilakukan oleh auditor. Dengan menggunakan inspeksi terhadap sebuah dokumen, auditor akan dapat menentukan keaslian dokumen tersebut. Dengan melakukan inspeksi terhadap kondisi fisik suatu aktiva tetap misalnya auditor akan dapat memperoleh informasi mengenai eksistensi dan keadaan fisik aktiva tersebut.
2. Pengamatan

   Pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh kegiatan yang biasa diamati oleh auditor dalam auditnya adalah perhitungan fisik persediaan yang ada di gudang klien. Dengan

pengamatan ini auditor akan dapat memperoleh bukti visual mengenai pelaksanaan suatu kegiatan. Objek yang diamati adalah karyawan, prosedur dan proses.

3. Permintaan keterangan

   Permintaan keterangan merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan dari prosedur ini adalah bukti lisan dan bukti dokumenter. Contoh prosedur audit ini adalah permintaan keterangan auditor mengenai tingkat keusangan persediaan yang ada di gudang, permintaan keterangan yang diajukan kepada penasihat hukum klien mengenai kemungkinan keputusan perkara pengadilan yang sedang ditangani oleh penasihat hukum tersebut.

4. Konfirmasi

   Seperti telah diuraikan di atas, konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Prosedur yang biasa ditempuh oleh auditor dalam konfirmasi ini adalah sebagai berikut:

   a) Auditor meminta dari klien untuk menanyakan informasi tertentu kepada pihak luar.
   b) Klien meminta kepada pihak luar yang ditunjuk oleh auditor untuk memberikan jawaban langsung kepada auditor mengenai yang ditanyakan oleh auditor tersebut.
   c) Auditor menerima jawaban langsung dari pihak ketiga tersebut.

5. Penelusuran

   Dalam melaksanakan prosedur audit ini, auditor melakukan penelusuran informasi sejak mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen, dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi. Prosedur audit ini terutama diterapkan terhadap bukti dokumenter. Contoh prosedur penelusuran yang dilakukan oleh auditor dengan memeriksa informasi dalam surat order dari *customer*, diusut kemudian dengan informasi yang berkaitan dalam surat order penjualan, laporan pengiriman barang, faktur penjualan, jurnal penjualan dan akun

piutang usaha dalam buku pembantu piutang usaha. Penelusuran dilakukan dengan tujuan untuk menentukan ketelitian dan kelengkapan catatan akuntansi.

6. Pemeriksaan bukti pendukung

   Pemeriksaan bukti pendukung merupakan prosedur audit yang meliputi inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya. Pembanding dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan. Prosedur ini berlawanan arahnya dengan prosedur penelusuran. Dalam penelusuran, auditor bertolak dari dokumen kemudian mengusut pencatatannya ke dalam catatan-catatan akuntansi yang berkaitan, sedangkan dalam pendukung, auditor bertolak dari catatan akuntansi, kembali memeriksa dokumen-dokumen yang mendukung informasi yang dicatat dalam catatan tersebut. Prosedur ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh bukti audit mengenai kebenaran perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi.

7. Perhitungan

   Prosedur audit ini meliputi perhitungan fisik terhadap sumber daya berwujud seperti kas atau persediaan di tangan. Pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut cetak. Perhitungan fisik digunakan untuk mengevaluasi bukti fisik kuantitas yang ada ditangan, sedangkan pertanggungjawaban formulir bernomor urut cetak digunakan mengevaluasi dokumenter yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi.

8. *Scanning*

   Hal ini merupakan penelaahan secara cepat terhadap dokumen, catatan dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam.

9. Pelaksanaan ulang

   Prosedur audit ini merupakan pengulangan aktivitas yang dilakukan oleh klien. Umumnya pelaksanaan ulang diterapkan pada perhitungan dan

rekomendasi yang telah dilakukan oleh klien. Contoh perhitungan ulang jumlah total dalam jurnal, perhitungan ulang biaya, depresiasi, biaya bunga terulang, perkalian antara kuantitas dengan harga satuan dalam *inventory summary sheets*, dan perhitungan ulang penjumlahan dalam rekonsiliasi bank.

10. *Computer assisted audit techniques*

    Ketika catatan akuntansi klien diselenggarakan dalam media elektronik, auditor perlu menggunakan *computer assisted audit techniques* dalam menggunakan berbagai prosedur audit yang dijelaskan diatas. Contoh auditor menggunakan suatu computer audit *softwere* tertentu dalam melaksanakan perhitungan jumlah saldo piutang usaha menurut buk pembantu piutang usaha, pemilihan nama debitur yang akan dikirim surat konfirmasi, perhitungan berbagai rasio dalam prosedur analitik, perbandingan unsur data yang terdapat dalam berbagai files.

2.4 Teori Variabel Independen

2.4.1 Keahlian

Definisi keahlian sampai saat ini masih belum terdapat definisi operasional yang tepat. Menurut Tan dan Libby (1997), keahlian audit dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu: keahlian teknis dan keahlian non teknis. Keahlian teknis adalah kemampuan mendasar seorang auditor berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi dan auditing secara umum. Sedangkan keahlian non teknis merupakan kemampuan dari dalam diri seorang auditor yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor personal dan pengalaman. Auditor harus memiliki keahlian yang diperlukan dalam tugasnya, keahlian ini meliputi keahlian mengenai audit yang mencakup antara lain: merencanakan program kerja pemeriksaan, menyusun program kerja pemeriksaan, melaksanakan program kerja pemeriksaan, menyusun kertas kerja pemeriksaan, menyusun berita pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaan (Praptomo, 2002).

Keahlian merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor independen untuk bekerja sebagai tenaga profesional. Sifat-sifat professional adalah kondisi-kondisi kesempurnaan teknik yang dimiliki seseorang melalui latihan dan belajar selama bertahun-tahun yang berguna untuk mengembangkan teknik tersebut, dan keinginan untuk mencapai kesempurnaan dan keunggulan dibandingkan rekan sejawatnya. Jadi, professional sejati harus mempunyai sifat yang jelas dan pengalaman yang luas. Jasa yang diberikan klien harus diperoleh dengan cara-cara yang professional yang diperoleh dengan belajar, latihan, pengalaman dan penyempurnaan keahlian auditing.

2.4.2 Pengalaman

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun nonformal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman sebagai salah satu variabel yang banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Bouwman (1997) menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas (*job*). Penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa tugas yangdilakukan secara berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar melakukannya dengan yang terbaik.

Dian, (2005) memberikan kesimpulan bahwa :

”Seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan dan mencari penyebab munculnya kesalahan. Keunggulan tersebut bermanfaat bagi pengembangan keahlian. Berbagai macam pengalaman yang dimiliki individu akan mempengaruhi pelaksanakan suatu tugas.”

Sedangkan menurut Abriyani (2004) :

“ Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telahditetapkan.”

Pendapat Simanjuntak (2005), tentang pengalaman adalah :

“Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja.”

Seperti dikatakan Bonner (2009):

“Peningkatan pengetahuan yang muncul dari penambahan pelatihan formal sama bagusnya dengan yang didapat dari pengalaman khusus dalam rangkamemenuhi persyaratan sebagai seorang professional. Auditor harus menjalani pelatihan yang cukup. Pelatihan disini dapat berupa kegiatan-kegiatan seperti seminar, simposium, lokakarya, dan kegiatan penunjang ketrampilan lainnya.Selain kegiatan-kegiatan tersebut, pengarahan yang diberikan oleh auditor *senior* kepada auditor pemula (*junior*) juga bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pelatihan karena kegiatan ini dapat meningkatkan kerja auditor, melalui program pelatihan dan praktek-praktek audit yang dilakukan para auditor juga mengalami proses sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang akan ia temui, struktur pengetahuan auditor yang berkenaan dengan kekeliruan mungkin akan berkembang dengan adanya program pelatihan auditor ataupun dengan bertambahnya pengalaman auditor.”

2.4.3 Kompetensi

Kompetensi adalah pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara *objektif*, cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Dengan begitu auditor akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi.

Menurut Dreyfus dan Dreyfus (1986) dalam Elfarini (2007) menyatakan bahwa:

"Kompetensi sebagai keahlian seorang yang berperan secara berkelanjutan yang mana pergerakannya melalui proses pembelajaran, dari "pengetahuan sesuatu" ke "mengetahui bagaimana", seperti misalnya: dari sekedar pengetahuan yang tergantung pada aturan tertentu kepada suatu pertanyaan yang bersifat *intuitif*."

Menurut Sprencer (2007) menjelaskan bahwa kompetensi sebagai berikut: "Suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut."Karakteristik kompetensi :

1. "Pengetahuan; Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem.
2. Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan.
3. Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi.
4. Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan.
5. Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan."

Berdasarkan defisinisi diatas kompetensi dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan ketrampilan dan pengalaman serta faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan.

2.4.4 Independensi

A. Definisi Independensi Akuntan Publik

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Carey (2006) dalam Mautz mendefinisikan independensi auditor dari segi integritas dan hubungannya dengan pendapat akuntan atas laporan keuangan. Independensi meliputi :

1. Kepercayaan terhadap diri sendiri yang terdapat pada beberapa orang profesional. Hal ini merupakan bagian integritas profesional.
2. Merupakan istilah penting yang mempunyai arti khusus dalam hubungannya dengan pendapat akuntan publik atas laporan keuangan. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit. Independensi akuntan publik mencakup empat aspek, yaitu :

1. Independensi sikap mental

   Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya.

2. Independensi penampilan.

   Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya. Independensi penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik.

3. Independensi praktisi (*practitioner independence*)

   Selain independensi sikap mental dan independensi penampilan, Mautz mengemukakan bahwa independensi akuntan publik juga meliputi independensi praktisi (*practitioner independence*) dan independensi profesi (*profession independence*). Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktisi secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Independensi ini mencakup tiga dimensi, yaitu independensi penyusunan progran, independensi investigatif, dan independensi pelaporan.

4. Independensi profesi (*profession independence*)

   Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuantan Publik yang ditetapkan olh IAI.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Auditor

Tidak dapat dipungkiri bahwa bahwa klien berusaha agar laporan keuangan yang dibuat oleh klien mendapatkan opini yang baik oleh auditor. Banyak cara

dilakukan agar auditor tidak menemukan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan bahkan yang lebih parah lagi adalah kecurangan-kecurangan yang dilakukan tidak dapat dideteksi oleh auditor.

Independensi akuntan publik dapat terpengaruh jika akuntan publik mempunyai kepentingan keuangan atau mempunyai hubungan usaha dengan klien yang diaudit. Menurut Lanvin (1976) dalam Supriyono (1988) independensi auditor dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Ikatan keuangan dan usaha dengan klien
2. Jasa-jasa lain selain jasa audit yang diberikan klien
3. Lamanya hubungan kantor akuntan publik dengan klien

Sedangkan menurut Shockley (1981) dalam Supriyono (1988) independensi akuntan publik dipengaruhi oleh faktor :

1. Persaingan antar akuntan publik
2. Pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien
3. Ukuran KAP
4. Lamanya hubungan antara KAP dengan klien

Dari faktor–faktor yang mempengaruhi independensi tersebut di atas bahwa independensi dapat dipengaruhi oleh ikatan keuangan dan usaha dengan klien, jasa-jasa lain yang diberikan auditor selain audit, persaingan antar KAP dan ukuran KAP. Seluruh faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik tersebut adalah ditinjau dari independensi dalam penampilan. Anggota harus memperhatikan standars teknik profesi dan etika berupaya terus untuk meningkatkan kemampuan, kualitas pelayanan dan pelaksanaan tanggung jawab profesional untuk mendapatkan kemampuan anggota yang baik.

1. Kecakapan (*due care*) mengaharapkan anggota melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kecakapan dan ketekunan. Hal ini memperlihatkan suatu kewajiban dalam pengadaan dan pelayanan yang profesional untuk mendapatkan kemampuan anggota yang memperhatikan

kepentingan utama dari setiap pelayanan/jasa yang diadakan dan kosisten dengan tanggung jawab profesi bagi masyarakat.

2. Kemampuan atau kompetisi didapatkan dari perpaduan pendidikan dan pengalaman. Dimulai dengan penguasaan pendidikan umum bagi penunjukkan sebagai auditor independen. Pemeliharaan kemampuan mengharapkan suatu komitmen untuk mempelajari dan meningkatkan kemampuan profesional. Ini merupakan tanggung jawab anggota. Dalam semua penugasan dan tanggung jawabnya, setiap anggota harus berusaha mencapai tingkat kemampuan yang menjamin bahwa kualitas pelayanan anggota telah sesuai dengan tingkat profesional yang dituntut oleh standar profesi.
3. Kemampuan adalah suatu pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pengertian dan pengetahuan yang dapat memungkinkan anggota memberikan pelayanan dengan cakap dan baik. Hal ini membuat suatu pembatasan terhadap kemampuan anggota. Setiap anggota bertanggung jawab menilai kemampuan mereka, mengevaluasi apakah pendidikan, pengalaman dan pertimabangannya cukup untuk suatu bentuk tanggung jawab yang dimaksudkan.
4. Semua anggota harus tekun dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap klien, pekerjaan dan masyarakat. Ketekunan membuat suatu pelayanan yang tepat dan teliti secara keseluruhan dan memperhatikan standar profesi yang dapat dipakai dan etika.
5. Kecakapan Profesional meminta anggota merencanakan dan mengawasi dengan cukup aktivitas profesional untuk pertanggungjawaban mereka.

2.4.5 Profesionalisme

A. Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme (*profésionalisme*) ialah suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing (Kurniawan, 2005). Dari pendapat tersebut maka saya menarik

kesimpulan bahwa profesional adalah seseorang yang melakukan pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan dan keterampilan khusus dibidang pekerjaannya.

B. Ciri-Ciri Profesionalisme

Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesional. Kualitas profesionalisme didokong oleh ciri-ciri sebagai berikut:

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal.

   Seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan piawai yang telah ditetapkan. Ia akan mengidentifikasi dirinya kepada sesorang yang dipandang memiliki piawaian tersebut. Yang dimaksud dengan "piawai ideal" ialah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan.
2. Meningkatkan dan memelihara *imej profesion*

   Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara imej profesion melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudannya dilakukan melalui berbagai-bagai cara misalnya penampilan, cara percakapan, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, sikap hidup harian, hubungan dengan individu lainnya.
3. Keinginan untuk sentiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan meperbaiki kualiti pengetahuan dan keterampiannya.
4. Mengejar kualiti dan cita-cita dalam *profesion*

   Profesionalisme ditandai dengan kualiti darjat rasa bangga akan *profesion* yang dipegangnya. Dalam hal ini diharapkan agar seseorang itu memiliki rasa bangga dan percaya diri akan *profesion*nya.

C. Kode Etik Profesional

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.

Apabila anggota kelompok profesi itu menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus mencoba menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring perkembangan zaman. Kode etik profesi merupakan pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar.

Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara rapi, lengkap, tanpa catatan, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti Dan Judul	Variabel yang diteliti / permasalahan	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
Herman Karamoy dan Heince R.N Wokas (2015) "Pengaruh independensi dan profesionalisme	Menganalisis independensidan profesionalisme dalam mendeteksi kecurangan dapat mempengaruhi	Regresi linier berganda	Mendeteksi kecurangan akan dipengaruhi oleh profesionalisme seorang auditor sedangkan

dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). Sulawesi Utara"	auditor dalam mendeteksi *fraud*.		independensi tidak signifikan berpengaruh bagi auditor internal di Inspektorat Sulawesi Utara.
Siti Rahayu dan Gudono (2014) "Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan."	Menganalisis pengaruh skeptisisme profesional, keahlian profesional, penelitian audit kecurangan, independensi, dan pengalaman terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.	Riset campuran dengan desain sekuensial eksplanatif	Faktor independensi dan pelatihan audit kecurangan berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan diruang lingkup BPKP Kalimantan Barat.
Fatima Nurita Wardhani (2014) "Pengaruh komponen keahlian auditor dalam mendeteksi kecurangan. Semarang"	Menguji pengaruh komponen keahlian yang dimiliki auditor yang berkategorikan menjadi pengetahuan, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan individu dan faktor eksternal dalam tugasnya mendeteksi kecurangan yang terjadi.	Regresi linier berganda	Pengetahuan, kemampuan berfikir, perilaku etis dan interpersonal skill memiliki pengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangann.
Muhammad Yusuf Aulia (2013)	Menganalisis pengaruh	Regresi linier berganda	Pengalaman, independensi dan

"Pengaruh pengalaman, independensi dan skeptisme, profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan."	pengalaman, independensi dan skeptisme, profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan.		skeptisme, profesional auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan.
Sri Hasanah (2010) "Pengaruh penerapan aturan etika, pengalaman dan skeptisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan."	Menganalisis pengaruh penerapan aturan etika, pengalaman dan skeptisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan.	Regresi linier berganda	Secara persial maupun simultan penerapan aturan etika, pengalaman, dan skeptisme profesional auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.
Eka putri pertiwi (2010) "Analisis Pengaruh Komponen Keahlian Internal Auditor Terhadap Pendeteksian Dan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Di Inspektorat Jendral Kementrian Perdagangan Republik Indonesia."	Menganalisis komponen keahlian internal auditor berpengaruh nyata terhadap pendeteksian kecurangan dan komponen keahlian internal auditor berpengaruh nyata terhadap pencegahan kecurangan.	Regresi linier berganda	Beberapa komponen keahlian yang diteliti dalam penelitian ini seluruhnya positif dan nyata terhadap pendeteksian maupun pencegahan kecurangan.

2.6 Kerangka Pemikiran

Auditor merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan penilaian dan kewajaran dari laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat pada umumnya, dan para pelaku bisnis pada khususnya, memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi. Seorang auditor juga bertanggung jawab mendeteksi apabila terjadi manipulasi-

manipulasi keuangan. Dalam proses audit, auditor dituntut kejujurannya ketika memeriksa laporan keuangan klien. Auditor harus mampu dan yakin bahwa dalam proses audit laporan keuangan yang dibuat boleh klien telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Dalam praktiknya, laporan keuangan yang dibuat oleh klien tidak jarang sering mengandung kecurangan dan kekeliruan yang mengandung salah saji yang material. Auditor menganalisa faktor-faktor kecurangan yang dilakukan entitas klien. Berdasarkan tujuan penelitian di atas mengenai pengaruh kualitas, keahlian, pengalaman, independensi dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan (*fraud*), maka dibuat kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

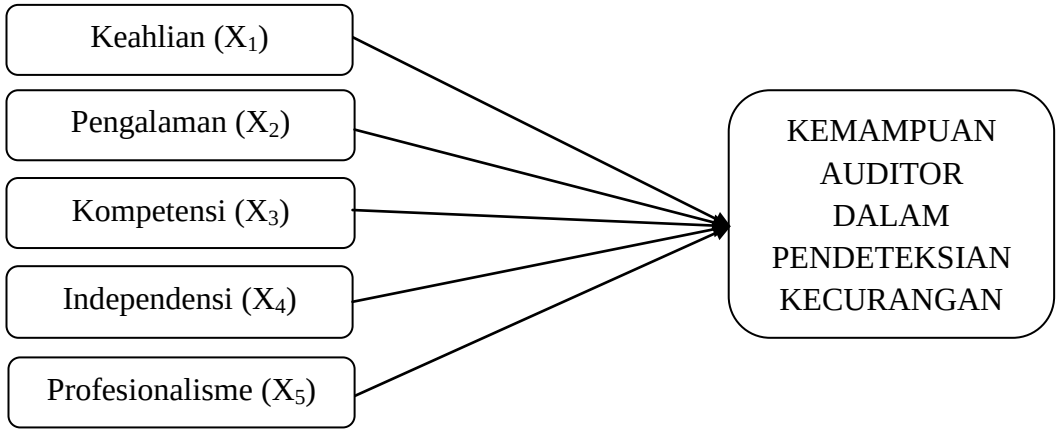

2.7 Bangunan Hipotesis

Berdasarkan teori, tinjauan literature serta kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

2.7.1 Pengaruh keahlian dengan kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan.

Keahlian dalam hal proses audit merupakan kemampuan auditor melaksanakan audit sesuai dengan peraturan yang ada. Ini berarti auditor wajib memiliki keahlian audit yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Keahlian audit merupakan faktor yang berkaitan dengan kemampuan prediksi auditor, auditor yang ahli memiliki perbedaan perhatian terhadap jenis informasi

yang digunakan maka semakin luas keahlian seorang auditor maka akan menjadi dasar pendeteksian kecurangan yang mungkin terjadi (Praptomo, 2002).

Penelitian Pertiwi (2010) dan Wardhani (2014) menyebutkan bahwa auditor yang memiliki keahlian akan memiliki pengetahuan tentang pendeteksian kecurangan yang lebih banyak sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam mendeteksi kasus kecurangan-kecurangan dibandingkan dengan auditor yang tidak memiliki keahlian. Keahlian seorang yang berperan secara berkelanjutan yang mana pergerakannya melalui proses pembelajaran, dari "pengetahuan sesuatu" ke "mengetahui bagaimana", seperti misalnya: dari sekedar pengetahuan yang tergantung pada aturan tertentu kepada suatu pertanyaan yang bersifat intuitif (Elfarini 2007).

H_1: Faktor keahlian berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan.

2.7.2 Pengaruh pengalaman dengan kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan.

Pengalaman merupakan keahlian yang berhubungan dengan profesionalisme dalam akuntansi yang diperlukan dalam auditing. Pengetahuan auditor tentang audit akan semakin berkembang dengan bertambahnya pengalaman kerja. Auditor yang berpengalaman akan memiliki pengetahuan tentang kekeliruan dan kecurangan yang lebih banyak maka akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi baik kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan asset perusahaan (Elfarini 2007). Dalam penelitian Hasanah (2010) dan Aulia (2013) yang menyatakan bahwa auditor yang berpengalaman dapat mendeteksi kekeliruan atau kecurangan. Dengan bertambahnya pengalaman auditing maka jumlah kecenderungan yang diketahui oleh auditor diharapkan akan bertambah dan semakin meningkatkan kemampuan mendeteksinya bila dihadapkan dengan gejala-gejala kecurangan.

H_2: Faktor pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan.

2.7.3 Pengaruh kompetensi dengan kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan.

Auditor yang memiliki kompetensi akan memiliki komitmen untuk melakukan audit dengan baik. Hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. Dalam penelitian Taufiq (2017) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Sehingga dalam melakukan pendeteksian kecurangan dibutuhkan seorang auditor yang memiliki kompetensi yang baik. kemampuan (ability) adalah kecapakan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktek dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakan. Maka semakin diperlukannya kompetensi seorang auditor agar dapat membuktikan kecurangan yang terjadi (Widyastuti dan Pamudji 2010).

H_3: Faktor kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan.

2.7.4 Pengaruh independensi dengan kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan.

Menurut Arens (2010) Independensi adalah cara pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan pengujian evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit. Seorang auditor harus mempertahankan objektifitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam melalukan tanggung jawab profesional. Independensi dalam profesi sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas auditor tersebut. Hubungan antara independensi auditor terhadap tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan adalah ditinjau dari aspek-aspek independensi yang berupa kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemuinya dalam auditnya. Maka

adanya sikap independen seorang auditor yang tidak dapat dipengaruhi orang lain terhadap kejujuran seorang auditor dalam pendeteksian kecurangan.

Penelitian mengenai independensi antara lain penelitian Aulia (2013) yang berjudul Pengaruh pengalaman, independensi dan skeptisme profesional auditor terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengalaman pengalaman, independensi dan skeptisme profesional auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Begitu juga dengan penelitian Rahayu dan Gudono (2014) menyatakan hasil independensi dan pelatihan audit berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

H_4: Faktor independen audit berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan

2.7.5 Pengaruh profesionalisme dengan kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan.

Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan bahwa skeptisme profesional sebagai sikap auditor yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Audit yang skeptis tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, tetapi akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti, dan konfirmasi mengenai objek yang dipermasalahkan, tanpa menerapkan skeptisme profesional, auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan-kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan, karena kecurangan biasanya akan disembunyikan oleh pelakunya (Widyastuti dan Pamudji 2010). Maka sikap profesionalisme seorang auditor memiliki peran penting dalam pendeteksian kecurangan suatu laporan keuangan. Menurut penelitian Hasanah (2010), Aulia (2013) dan Karamoy dan Wokas (2015) hasilnya menunjukan bahwa adanya hubungan positif antara profesionalisme auditor dalam kemampuan mendeteksi kecurangan.

H_5: Faktor Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan.